

Pluralitas Agama Dan Konflik Beragama

Benyamin Molan

ABSTRAK: Pluralitas agama sering dituding sebagai kondisi yang bersimpul pada konflik dan perseteruan antara kelompok agama. Sesungguhnya konflik dan perseteruan itu bukan merupakan kesimpulan dari perbedaan, melainkan sebuah keputusan imperatif yang sering tidak ada hubungan dengannya, selain hanya memanfaatkan, kondisi tersebut. Konflik-konflik dan perseteruan antar agama harus diamati lebih luas dari ranah agama saja, karena agama berinteraksi dengan budaya dan keterbatasan manusia. Dengan demikian penafsiran dan praktik-praktik serta implementasi kebenaran agama, hendaknya selalu didampingi pertimbangan-pertimbangan etis dan terus direfleksikan dari dalam, demi menguji kesetiaan agama pada kebenaran-kebenaran yang diwartakan. Agama juga menuntut penghayatan yang mengandaikan kebebasan. Maka agama pun berpotensi untuk menjadi beranekaragam. Tetapi keanekaragaman tidak harus menjadi premis untuk menyimpulkan adanya konflik. Konflik, seperti juga kerukunan, merupakan keputusan yang bisa diambil atas dasar perbedaan dan keanekaragaman. Oleh karena itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan etis untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bermartabat.

KATA KUNCI: agama, keanekaragaman, kebebasan, konflik, konklusi, keputusan, refleksi.

ABSTRACT: *Religious diversity is often blamed to cause conflicts and hostilities among religious communities. On the contrary, conflicts and hostilities are not considerably caused by diversity. They are rather an imperative decision by those involved; and such decision often had no relationship with diversity, which are actually abused by the conflicting and hostile parties. Religious conflicts and disputes should be examined from a wider perspective, because every religion has always immersed into respected human cultures and confined by human limitations. So, the interpretation, the practice as well as the implementation of religious truths should go hand in hand with ethical considerations and internal reflections, in order to check the religious loyalty to the proclaimed truths. Enlivering the proclaimed truths requires freedom. Therefore religious lives may be varied in their expressions. Meaning to say enlivering the religious truths may lead to diversity. But such diversity should not be understood as a premise for conflict. Conflict is a result of decision making, on the basis of*

differences and diversities, so is harmony. Therefore, ethical considerations are required to make graceful decisions.

KEY WORDS: *religion, diversity, freedom, conflict, conclusions, decisions, reflection.*

1. PENDAHULUAN

Amartya Sen mengajukan kritiknya terhadap karya terkemuka John Rawls *A Theory of Justice*, karena menganggap Rawls menggunakan konsep keadilan yang didasarkan pada *comprehensive doctrine* tunggal, pada hal ada banyak *comprehensives doctrines*, dan setiap orang bahkan menganut lebih dari satu *comprehensive doctrines*.¹ Selain agama, masih ada budaya, adat istiadat, tradisi, ideologi, yang juga merupakan doktrin-doktrin komprehensif.

Karena menganut lebih dari satu doktrin komprehensif inilah, identitas seseorang menjadi multi. Menafikan doktrin komprehensif lain berarti menyingkirkan identitas lain dan hanya mengakui serta mengutamakan satu identitas saja. Dengan mengutamakan satu identitas saja dan mengabaikan identitas lainnya, orang akan menjadi fundamentalist yang fanatik, berwawasan sempit, dan hanya membangun sikapnya atas dasar satu identitas saja.² Ini sesungguhnya merupakan sebuah sikap yang diambil secara sengaja, dan bukan merupakan konsekuensi turunan dari multiidentitas. Multi identitas justru berpotensi dan berfungsi sebagai *intersection* untuk membangun relasi dalam kemajemukan. Dengan kata lain, mengabaikan identitas lain itu bukan merupakan konsekuensi dari kemajemukan melainkan bagian dari keputusan yang diambil untuk menyikapi kemajemukan.

Karena itu menuding keanekaragaman sebagai biang kerok bagi konflik-konflik destruktif rasanya kurang tepat. Konflik dan perseteruan antar

agama, bahkan yang bisa meningkat sampai kekerasan, adalah keputusan yang diambil dengan mendasarkannya pada, atau bahkan memanfaatkan, perbedaan dan keanekaragaman. Karena itu persetujuan antar umat beragama hanya bisa diredam, ketika semua pihak mengambil keputusan secara matang atas perbedaan, dan bukannya membiarkan konflik berkembang menjadi kekerasan, lalu merasionalisasikannya sebagai kesimpulan dari perbedaan dan kemajemukan. Dengan demikian perbedaan tidak harus serta merta berujung pada konflik. Kalau konflik adalah keputusan, berarti lawan dari konflik (kerukunan), adalah keputusan juga. Setiap keputusan selalu berproses melalui pertimbangan-pertimbangan kritis, antara lain apakah keputusan untuk menyikapi perbedaan dengan melancarkan konflik yang destruktif, merupakan keputusan yang memenuhi pertimbangan akal sehat, serta kajian-kajian etis yang menjunjung tinggi martabat manusia? Pertimbangan kritis ini, bahkan dari masing-masing pihak yang berseteru, bisa menghantar kita untuk sampai pada keputusan yang konstruktif, dan tidak serta merta menyulut konflik destruktif sebagai kesimpulan dari kemajemukan.

2. AGAMA, BUDAYA, DAN KEANEKARAGAMAN

Dalam satu sesi pembahasan tentang moralitas di hadapan para orang tua siswadi sebuah sekolah A. S., Thomas Lickona³ mendapat pertanyaan dari salah satu orang tua siswa: “Seandainya Anda tidak menggunakan Alkitab untuk menjelaskan moralitas, maka dasar apa yang akan Anda gunakan? Lickona menjawab pertanyaan ini dengan mengutarakan riset kecil yang dilakukan Professor Larry Nucci dari Universitas Illinois, Chicago. Lary bertanya kepada anak-anak yang beragama Katolik, Protestan, dan Yahudi: “apakah tindakan-

tindakan jahat seperti membunuh, mencuri, memukul, akan tetap salah seandainya Tuhan tidak melarangnya?” Sekitar 85% anak mengatakan bahwa perbuatan itu tetap salah. “Seandainya Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat tadi, apakah perbuatan itu menjadi baik?” Michel yang beragama Yahudi membantah. Menurut dia Tuhan itu dari dirinya sendiri baik maka dia tidak akan memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan dirinya sendiri.

Ilustrasi ini sedikit banyak merujuk pada karya Plato: *Euthypro*, yang menampilkan dialog antara Sokrates dan Euthypro tentang kesalehan. Apakah suatu tindakan dan perilaku disebut saleh *karena* Tuhan menyukainya atau *maka* Tuhan menyukainya. Pertanyaan yang kemudian diperluas menjadi apakah suatu perbuatan itu baik itu karena Tuhan menyukainya sehingga menjadi baik, atau maka Tuhan menyukainya, karena pada dasarnya baik. Yang pertama mengandaikan Tuhan yang menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Yang kedua, mengandaikan bahwa pada dasarnya suatu perbuatan itu baik lepas dari Tuhan menyukainya atau tidak. Tetapi karena Tuhan itu pada dasarnya baik maka dia tidak akan menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tampak di sini bahwa kesalehan atau kebaikan itu memang tidak hanya kondisi agama, melainkan juga kondisi budaya manusia. Bahwa kebaikan dan kesalehan itu sudah ada dalam budaya manusia, yang bagi orang religius itu disampaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan berbicara juga melalui budaya manusia. Itu berarti agama tidak bisa dilepaskan dari budaya manusia.

Bahwa agama tidak bisa lepas dari budaya, tidak hanya tampak dalam religionisasi, ketika agama mempengaruhi budaya dan mendorong sebuah habitus baru, (setelah budaya yang lama dianggap tidak etis misalnya),

melainkan juga dalam inkulturasi. Budaya tidak selamanya buruk dan harus diganti dengan habitus baru. Ada juga nilai-nilai budaya seperti kearifan-kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan, memperdalam serta menginternalisasi kebenaran-kebenaran agama. Dalam hal ini agama bisa dihayati dan diimani dengan pola-pola budaya yang membuat ajaran agama bisa menjadi implikatif. Di sini budaya-budaya dapat dihargai juga sebagai *lumen naturale* yang juga menjadi bagian dari *comprehensive doctrines* yang telah memandu kehidupan banyak penganutnya.⁴

Kalau ajaran agama dan hidup beragama mau dipisahkan, untuk mengatakan bahwa yang pertama itu berasal dari Tuhan sedangkan yang kedua adalah bagian dari perilaku budaya manusia, tetap juga harus diakui bahwa agama tak bisa dilepaskan dari sentuhan budaya manusia. Di sinilah letak ketegangan antara bagaimana ajaran agama harus dibahasakan dalam pola serta cara berpikir manusia, supaya bisa ditangkap dan dirumuskan untuk, pada gilirannya, dikomunikasikan oleh, dan dalam keterbatasan, bahasa dan akal budi manusia.⁵ Maka tidak bisa diingkari bahwa agama juga menyentuh aspek akal dan budi daya manusia, serta tindak lakunya. Tindak laku manusia yang tercakup dalam ranah budaya manusia selalu harus ditata agar menjadi tindak laku yang baik, entah sesuai dengan ajaran agama, atau sesuai dengan akal sehat dalam doktrin-doktrin komprehensif, yang diuji dengan prinsip-prinsip dan metode etika.

Kalau agama memang termasuk bagian dari budaya dan cukup mewarnai budaya, maka agama juga ikut terpola dalam karakteristik budaya yang bersifat plural dan beranekaragam; dan dengan demikian tercakup dalam konteks multikulturalisme dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Pluralitas, baik kultur maupun agama, adalah fakta yang tak bisa dipungkiri. Dengan

beragama manusia mengekspresikan religiositas yang ada dalam dirinya, (lepas dari soal apakah rasa itu memang sudah tertanam dalam diri setiap manusia atau baru muncul setelah berpaparan dengan peradaban).⁶Yang jelas religiositas itu melahirkan pengalaman-pengalaman religius yang sifatnya personal, dan karena itu sangat beraneka ragam dan tidak dapat dipersandingkan untuk dibandingkan, selain hanya untuk di-*share*-kan. Mengapa? Karena pertama, pengalaman-pengalaman itu tidak pernah bisa diverifikasi atau difalsifikasi; kedua, pengalaman-pengalaman itu juga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang niscaya untuk ditolak atau dianut. Di sini ada wilayah kebebasan di mana orang bisa memutuskan untuk percaya pada apa yang diyakininya sepenuhnya tanpa diniscayakan oleh bukti-bukti yang teruji secara empiris. Bahkan kadar keyakinan sering meningkat sejalan dengan kadar kemistikannya.

Pengalaman-pengalaman religius itu bisa dianalisis dan ditafsirkan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani kehidupan. Maka menggunakan prinsip dan metode dikotomis untuk mendekati kebenaran-kebenaran agama pasti keliru. Pengalaman religius itu tidak dapat dibuktikan sebagai isu-isu faktual yang berujung pada kesimpulan dikotomis sebagai benar atau salah. Pengalaman religius hanya bisa dianut, bukannya disandingkan untuk diperbandingkan lalu dipertandingkan melalui debat kusir untuk menentukan mana pengalaman yang benar dan mana yang palsu; mana pengalaman yang membuat subyek tertentu merasa lebih berhak mengklaim tempat di surga dan mana yang tidak. Kita pun tidak dapat menarik kesimpulan yang valid dari pengalaman-pengalaman itu, selain hanya mengambil langkah dan keputusan. Pengalaman inilah yang kiranya oleh Berkeley dan kemudian Kant, disebut sebagai *lompatan iman*. Di ranah inilah pengalaman-pengalaman mistik dan

religius berjumpa tanpa bisa diarahkan secara inferensial oleh argumentasi-argumentasi intelektual. Di arena inilah terletak kebebasan manusia untuk menghayati imannya.

Praktik-praktik budaya entah sebagai cara untuk menangkap secara otentik pewahyuan kebenaran agama dengan budaya-budaya yang ada (inkulturasi) atau pembentukan budaya baru sesuai dengan penafsiran ajaran agama (religionisasi), tetap berada dalam area kemampuan budi daya manusia. Maka tindakan manusia dalam beragama itu selalu harus direfleksikan secara kritis terutama dalam ranah agama itu sendiri. Kritik dari luar agama bersangkutan, berpotensi menimbulkan konflik, terutama karena setiap agama memiliki *language game* sendiri yang lebih dipahami oleh penganutnya. Maka ketika swa-refleksitidak berjalan, kehidupan beragama dalam masyarakat tidak dapat berfungsi seutuhnya, dalam membangun hidup bersama yang harmonis seiring dengan pembangunan masyarakat multikulturalistik.

Karena praktik-praktik agama adalah bagian dari budaya, maka praktik-praktik itu perlu diuji untuk mendapatkan pemurnian dan kesejatian. Pengujian itu tidak untuk menilai apakah ajaran-ajaran agama itu benar atau salah, melainkan apakah penafsiran dan implementasi ajaran agama itu tepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Karena kebebasan manusia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan beragama, maka agama tetap berpotensi untuk selalu beraneka ragam. Keanekaragaman manusia sebenarnya berakar pada kebebasan manusia. Dalam kebebasannya, manusia bisa melakukan sesuatu yang berasal dari keputusannya sendiri. Kebebasan adalah wilayah tempat seseorang bertindak sesuai keputusan kehendaknya sendiri. Ruang kebebasan adalah arena setiap pribadi mengekspresikan

dirinya, secara otentik dan sejati. Dalam kebebasannya manusia bergerak dan bertumbuh sesuai dengan potensi dan kemampuan yang terkandung dalam dirinya sendiri. Dalam kebebasan juga manusia menata kehidupannya dalam ruang dan waktunya sendiri yang tidak bisa direbut atau diambil orang lain, bahkan secara paksa oleh orang yang paling berkuasa sekalipun; juga tidak dapat dihibahkan secara sukarela oleh si pemiliknya. Dalam bereksistensi dan menjalani hidupnya, setiap manusia secara serta merta mendapatkan ruang dan waktunya sendiri, secara deterministik, untuk menjadi orang bebas. Karena ruang dan waktu itu tidak pernah bisa sama pada setiap orang, maka sudut pandang setiap orang pun tak pernah sama apalagi seragam.

Dengan demikian wilayah kebebasan seseorang adalah wilayah privat khas manusia yang tidak bisa ditembus oleh invasi dan intervensi dari suatu otoritas publik. Pantas kalau Sartre menggunakan ungkapan yang agak kontradiktif bahwa manusia itu bebas, harus bebas, bahkan ter hukum untuk bebas. Manusia tidak bisa bebas untuk menjadi tidak bebas. Jadi ada semacam keharusan deterministik untuk menjadi bebas.

Kebebasan juga menjadi obyek kajian yang utama dalam percakapan tentang multikulturalisme, bersanding dengan kesetaraan. Dalam hal ini kebebasan merupakan landasan bagi terbangunnya dinamika dalam masyarakat multikultural, sementara kesetaraan menjadi landasan bagi terbangunnya stabilitas dalam hidup bersama. Begitu juga ketika berbicara tentang publik dan privat. Publik cenderung mengandalkan dan memperjuangkan kesetaraan, sementara privat lebih bergerak dalam ranah kebebasan. Ini bisa terjadi juga dengan budaya dan politik. Politik lebih memperjuangkan kesetaraan, sementara budaya lebih membuka ruang bagi kebebasan.⁷

PLURALITAS AGAMA DAN KONFLIK BERAGAMA
BENYAMIN MOLAN

Kesadaran beragama termasuk dalam domain privat yang terstrukturasi di atas ruang dan relung kebebasan. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan beragama, orang tidak hanya harus selalu mencanangkan kebebasan beragama, melainkan juga harus menyatakan dengan lantang bahwa dalam menjalankan kegiatan beragama pun orang membutuhkan kebebasan. Satu tanda keanekaragaman yang penting adalah adanya pembaharuan dan pertobatan. Hanya orang bebas yang bisa bertobat dan memperbaharui diri. Tobat dan pembaharuan itu tidak bisa dipaksakan, atau didorong dengan ancaman. Orang yang menyatakan diri tobat hanya lantaranterdorong oleh rasa takut terhadap ancaman atau penyiksaan, sebenarnya tidak bertobat, melainkan takut. Tobat yang dipaksakan sesungguhnya adalah tobat yang dipalsukan, dan merupakan bagian dari hipokrisi atau kemunafikan.

Selain itu keanekaragaman kehidupan beragama sebagai bagian dari budaya dapat juga didekati dari aspek ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agama di sini seperti teologi misalnya, lebih dimaksudkan untuk menemukan kebenaran daripada mengklaim kebenaran. Teologi tidak bermaksud membuktikan kesesatan ajaran melainkan untuk mempertanggung jawabkan penafsiran terhadap ajaran Tuhan. Dalam hal initeologi harus mengacu pada peristiwa historis tertentu sebagai peristiwa perwahyuan lalu dirumuskan agar dipahami manusia sesuai zamannya.⁸

Dalam teologi kita berbicara tentang pendekatan terhadap agama dengan menggunakan bagian dari aspek budaya manusia yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Teologi adalah ilmu. Kebenaran-kebenaran agama harus masuk ke dalam kondisi dan kemampuan serta keterbatasan manusia juga yang kita sebut ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan agama kita

juga bisa bicara tentang *noumenon*(apriori) agama, yang akhirnya kita terima sebagai *fenomenon*(aposteriori) dalam budaya manusia.⁹ Dan fenomenon yang aposteriori itu pun tak pernah bisa seragam. Dalam hal ini agama tidak hanya mengarah pada keadaan obyektifnya yang datang dari Tuhan, melainkan juga pada keadaan subyektif manusia yang menangkapnya. Bukan hanya manusia yang datang pada agama, tetapi agama juga datang pada manusia, masuk dalam daya tangkap dan alam pikiran manusia. Kebenaran-kebenaran agama itu termasuk dalam seluruh aspek kemanusiaan, entah pengetahuan, perasaan, historisitas, kebebasannya, fantasi dan imaginasi, kesan dan perasaannya, postulat dan kategori-kategori yang ada dalam dirinya sebagai subyek, yang semuanya pasti tidak akan berujung pada suatu keseragaman budaya. Setiap upaya penyeragaman agama selalu akan bermuara pada keanekaragaman.

Walaupun, di wilayah publik ada kemungkinan untuk menjadi seragam, tetapi di wilayah ini juga, kita berhadapan dengan suatu kecenderungan yang kuat pada setiap orang untuk menunjukkan identitasnya yang berbeda dari yang lain. Tampil beda merupakan satu metode yang efektif untuk menunjukkan identitas. Maka kecenderungan ini akan ikut mempersulit terjadinya keseragaman. Ketika terjadi keseragaman, akan ada orang yang ingin menunjukkan dirinya sebagai berbeda dari yang lain; ingin menunjukkan bahwa apa yang diyakininya itu lebih benar dari yang lain; ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih saleh dari yang lain karena mengikuti ajaran tertentu yang dianggap lebih autentik. Ini mudah sekali terjadi dalam lingkup agama karena ajaran-ajaran agama itu menyangkut kebenaran yang dikukuhkan dengan keyakinan iman, dan bukannya berdasarkan pembuktian empiris faktual. Perlu disadari bahwa kebenaran atas dasar pembuktian empiris sekalipun,

sesungguhnya tidak pernah sampai pada kebenaran mutlak. Pembuktian-pembuktian dengan metode induktif hanya sampai pada kebenaran yang diukur berdasarkan tingkat probabilitas, bukan tingkat absolutitas; dan bisa teruji dengan falsifikasi, dan bukan sekadar verifikasi.

Tidak mengherankan bahwa keanekaragaman selalu akan tampil, bahkan ketika sudah dicapai keseragaman. Setiap kali keseragaman ditampilkan, akan muncul juga perbedaan. Keanekaragaman itu ibarat *mutant* yang terus timbul setiap kali ada keseragaman baru yang muncul. Ketika perbedaan-perbedaan dianggap sebagai kondisi dan biang konflik serta percecokan, munculah juga di sana usaha penyeragaman. Tetapi ketika keseragaman dicapai, aspek keanekaragaman lain pun akan tampil. Bukan hanya orang yang berbeda agama atau berbeda iman saja yang bisa mengekspresikan imannya secara berbeda, melainkan juga orang yang seiman.

3. KONFLIK DAN KEANEKARAGAMAN AGAMA

Persoalan agama sering dianggap sebagai sangat peka terhadap kehidupan bersama, karena keyakinan religius itu mengena langsung pada cara hidup seseorang. Menganut sebuah agama adalah bagian dari kebebasan dalam mengambil keputusan untuk menerima keseluruhan cara hidup; dan bahwa keputusan-keputusan tersebut selalu melibatkan emosi dan juga intelek.¹⁰

Perjalanan sejarah manusia pun memperlihatkan bahwa hingga dewasa ini, agama-agama yang berbeda-beda di dunia ini, telah berkembang dengan sikap saling mengabaikan pada tingkat yang sangat tinggi. Ini dapat kita amati dalam ekspansi Budhisme selama tiga abad sebelum Masehi dan di awal era Kristiani, yang membawa pesannya ke seluruh India dan Asia Tenggara serta ke

China, Tibet, dan Jepang. Ekspansi ini kemudian bersinggungan dengan munculnya agama Hindu; akibatnya Buddhisme agak tersingkir dan jarang ditemukan lagi di sub-kontinen India dewasa ini. Juga ekspansi Kristen pertama ke Kerajaan Romawi; kemudian ekspansi Islam di abad ketujuh dan delapan yakni ke Timur Tengah, Eropa, dan kemudian India; dan akhirnya, ekspansi Kristen kedua dalam gerakan misioner abad sembilan belas. Semua interaksi ini lebih banyak berlangsung dalam konflik ketimbang dalam dialog. Dan karenanya ekspansi ini lebih cenderung berupaya untuk membuktikan kepalsuan agama lain daripada membuktikan kebenaran agama sendiri.¹¹ Dan, lagi-lagi karena keyakinan itu bersifat subyektif yang membutuhkan satu loncatan iman yang tidak bisa dibuktikan secara obyektif, maka ada kecenderungan seperti yang dirumuskan David Hume, bahwa dalam hal agama, berlaku prinsip “apa pun yang berbeda itu bertentangan.”¹²

Padahal perbedaan pandangan sesungguhnya tidak harus bertentangan apa lagi berkonflik. Perbedaan dan keanekaragaman tidak bisa secara serta merta merujuk pada kesimpulan bahwa harus ada konflik yang destruktif. Perbedaan itu adalah kondisi faktual sedangkan konflik adalah sikap yang bisa diputuskan untuk diambil berhadapan dengan fakta. Jadi konflik itu bukan kesimpulan yang niscaya, melainkan keputusan yang perlu diambil. Kondisi keanekaragaman merupakan kondisi yang terbuka bagi keputusan apa pun yang bisa diambil, tetapi bukan kesimpulan imperatif. Misalnya, banjir yang melanda Jakarta, tidak harus menghantar ke kesimpulan yang niscaya bahwa orang harus tinggal di rumah. Keputusan lain bisa saja diambil, misalnya ke luar rumah untuk menolong orang. “Kita tidak dapat menarik kesimpulan dari kalimat berita menjadi kalimat perintah”.¹³

Orang Kristen dan Yahudi misalnya, berbeda pandangan tentang apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Menurut pandangan Kristen Yesus adalah Mesias. Sedangkan menurut pandangan Yahudi Yesus itu bukan Mesias. Tetapi faham Mesias pada orang Kristen dan orang Yahudi itu berbeda. Orang Yahudi menganggap Yesus itu bukan Mesias karena menurut mereka Mesias adalah tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Sementara Mesias menurut orang Kristen bukan tokoh politik duniawi melainkan tokoh ilahi yang membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Jelas di sini hanya ada perbedaan, bukan pertentangan. Pandangan orang Kristen bahwa Yesus adalah Mesias tidak bertentangan dengan pandangan Yahudi bahwa Yesus bukan Mesias. Maka kalau kemudian orang Yahudi dan Kristen mempertentangkan bahkan berkonflik karena masalah ini, sesungguhnya bukan karena ada konflik dalam ajarannya, melainkan karena kedua pihak mau menjadikannya sebagai arena konflik. Jelas bahwa konflik di sini, bukan kesimpulan dari perbedaan melainkan keputusan yang diambil atas dasar perbedaan.¹⁴

Tidak mengherankan bahwa perkembangan agama-agama hampir selalu sarat konflik. Namun apakah dengan demikian kita harus setia melanjutkan tradisi historis ini dan memaklumkan ketak-berdayaan kita mengkreasi sejarah? Ini juga bukan kesimpulan melainkan keputusan yang harus menjadi tekad bersama. Dalam proses pengambilan keputusan ada potensi terjadinya konflik. Kiranya yang perlu dilakukan adalah menata-kelola konflik itu sehingga kehadiran agama-agama ini benar-benar menyelamatkan sesuai hakikat agama, dan bukannya mencelakakan. Agama seharusnya memberikan inspirasi untuk mengelola konflik dan bukannya menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Tuntutan normatif ini harus diupayakan sebagai keputusan yang harus diambil,

dan tidak bisa diharapkan saja akan muncul sebagai keimpulan yang bersifat niscaya.

Ada konflik yang bersifat konstruktif, dan ada konflik yang bersifat destruktif. Konflik pada tingkat minimal yang sehat sebenarnya bisa juga bermanfaat untuk membangun dinamika yang diperlukan untuk membawa perkembangan, misalnya untuk membangun dan memurnikan iman seseorang dalam agama sendiri. Atau bisa dirumuskan lebih tepat dalam istilah “terbuka terhadap pertobatan,” tanpa harus beralih ke agama lain. Karena itu konflik-konflik agama harus dilihat dengan kaca mata yang lebih kritis.

Sudah banyak disinyalir bahwa Indonesia rawan konflik antar agama atau antar umat beragama. Pembakaran rumah ibadah, peledakan bom di tempat ibadah, kerusuhan antar kelompok agama, merupakan indikasi adanya konflik-konflik yang destruktif. Namun seiring dengan semakin terbukanya wawasan masyarakat, banyak pertanyaan kritis pun mulai diajukan, seperti “apakah konflik-konflik itu memang konflik agama atau sebetulnya konflik yang timbul karena didomplengi agenda dan pesan tersamar di balik konflik-konflik berkedok agama?” Ini sudah merupakan tanda-tanda bahwa orang tidak lagi melihat konflik-konflik ini sebagai kesimpulan melainkan--dengan wawasan dan karakter bersikap kritis--sebagai keputusan yang tidak serta merta berhubungan dengan perbedaan dan keanekaragaman.

Perbedaan-perbedaan dalam ajaran dogmatis pun sesungguhnya tidak harus berujung pada kesimpulan untuk berkonflik. Dalam hal ini pun, konflik merupakan keputusan, bukan konklusi. Ketika setiap penganut agama menyadari bahwa fungsi eksplisit dari agama adalah menawarkan prospek keselamatan dan memberikan manusia pedoman yang sesuai untuk mencapai

keselamatan itu, maka konflik dan perseteruan berbentuk kekerasan, pasti bukan merupakan kesimpulan yang niscaya, melainkan keputusan tanpa pertimbangan akal sehat, dan karena itu mengkhianati hakikat agama sendiri.

Apa yang dipahami sebagai keselamatan pun bisa berbeda-beda dari satu budaya dan agama, ke budaya dan agama lainnya. Kadang-kadang keselamatan itu diungkapkan sebagai kemenangan atas maut, entah dengan perpindahan jiwa manusia ke dunia yang lebih adi (surga), atau dengan kebangkitan tubuh secara ajaib kelak di akhir zaman (eskaton). Dalam Hinduisme misalnya keselamatan didapatkan melalui reinkarnasi ke tingkat yang lebih sempurna sesuai dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut kasta masing-masing. Dalam Buddhisme Theravada pengalaman keselamatan terakhir didapatkan dalam pencapaian nirvana dan pembebasan dari segala macam keinginan. Dalam Buddhisme tradisi utama, keselamatan difahami sebagai pencapaian keadaan paling berahmat, di mana orang mampu menjangkau dan menawarkan bantuan kepada orang lain yang mencari keselamatan. Dalam agama-agama yang lebih sederhana, keselamatan praktis difahami secara jauh lebih sempit seperti kesembuhan dari sakit, pelepasan dari pengaruh kekuatan magis, atau mengatasi kutukan tukang sihir.¹⁵ Tetapi perbedaan-perbedaan ini pun tidak akan secara serta merta menimbulkan konflik, kalau tidak ada keputusan untuk berkonflik.

Cara untuk mencapai keselamatan itu pun dipahami secara berbeda-beda. Walaupun umumnya agama mengajarkan etika dan moral untuk mencapai keselamatan, faham yang mendukungnya pun tetap saja bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap tindakan moral sebagai amal bakti untuk membalas kebaikan Tuhan dan mendapatkan imbalan keselamatan. Implikasinya adalah bahwa anugerah keselamatan, bisa didapatkan melalui perbuatan amal bakti.

Ada yang menganggap perbuatan moral sebagai jawaban terhadap kasih Tuhan yang sudah menjamin keselamatan bagi manusia. Perbuatan amal manusia tidak memengaruhi kebaikan Tuhan, karena keselamatan semata-mata merupakan anugerah dari kemurahan Tuhan. Berbuat baik dan amal bakti adalah tanda syukur atas kebaikan Tuhan. Terlihat di sini bahwa pada aspek implikasinya sama, manusia itu berbuat baik kepada sesamanya. Perbedaan justru pada konsep dogmatisnya. Tetapi sekali lagi perbedaan ini pun tidak mengarah pada kesimpulan untuk berseteru, kalau bukan dilakukan sebagai keputusan.

Keanakeragaman ini pun tidak hanya ada pada agama yang berbeda. Dalam agama yang sama pun sering ada perbedaan. Dalam agama Kristen terdapat berbagai macam Gereja dan denominasi. Begitu pun dalam Islam, Hindu, dan Budha. Sampai di mana pun orang mencapai keseragaman, keanekaragaman tetap akan menampilkan diri, karena pada dasarnya memang setiap individu itu tidak seragam. Setiap orang ingin menampilkan identitasnya yang khas, otentik, dan unik, dan karenanya berbeda dari yang lain.

Adalah hal yang biasa bahwa dalam agama yang sama muncul satu atau sekelompok orang yang berupaya untuk menjadi lebih fundamentalist, yang sering menganggap diri lebih benar dan lebih elit, lebih terpandang daripada penganut-penganut lain dalam agama yang sama. Masalahnya adalah bahwa ada semacam konkurensi antara kelompok-kelompok ini untuk menjadi fundamentalist. Ketika fundamentalist sudah beralih dari tunggal (hakikat) menjadi jamak (*fundamentalists*), maka akan timbul masalah. Fundamentalist itu pada hakikatnya memang tunggal (*fundamentalist*) dan tidak bisa menjadi jamak (*fundamentalists*).¹⁶ Kalau fundamentalis (tunggal) sudah menjadi *fundamentalists* (jamak) berarti bukan hanya ada perbedaan

melainkan juga sudah ada potensi konflik, untuk menentukan siapa fundamentalist (tunggal) sesungguhnya. Dalam kondisi ini pun sebenarnya hanya ada perbedaan pandangan mengenai ajaran mana yang sesungguhnya lebih fundamental. Karenanya seandainya timbul konflik dalam hal ini, maka pasti konflik tersebut juga merupakan bagian dari keputusan, dan bukan konklusi yang bersifat niscaya.

Namun kondisi ini pun harus dilihat secara kritis apakah di sini memang terjadi konflik dogmatis teologis atau konflik politis ideologis? Seperti sudah dikatakan, perbedaan-perbedaan dogmatis tidak harus berkonflik. Konflik sengaja ditimbulkan sebagai keputusan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan perbedaan dogmatis untuk kepentingan-kepentingan lain.

Kalau persetujuan adalah bagian dari keputusan maka sesungguhnya tidak ada konflik agama. Agama itu beraneka-ragam (plural), dan tidak harus berkonflik. Konflik adalah keputusan yang diambil secara implikatif dan bukan inferensial, dari kondisi keanekaragaman itu. Apa lagi kalau agama selalu lebih dilihat sebagai sekelompok orang. Dan setiap kelompok agama sepertinya berusaha untuk mempertahankan anggotanya dan diajarkan untuk menarik orang lain sebanyak mungkin agar ikut bergabung (*member*) dalam kelompoknya melalui kegiatan-kegiatan misioner yang dikenal sebagai dakwah atau evangelisasi.

Sayangnya kegiatan-kegiatan ini terkesan tidak lagi untukewartakan keselamatan (inklusif) melainkan untuk memonopoli keselamatan (eksklusif). Perpindahan orang dari satu agama ke agama lain, serta merta dianggap mur-tad oleh satu agama dan dianggap bertobat oleh agama lain. Belum lagi kalau pertobatan ini dimanfaatkan sebagai sarana kesaksian dan promosi untuk mengukuhkan kebenaran agama yang baru dimasuki, dan menyatakan kepalsuan

agama yang ditinggalkan. Orang yang pindah agama pun cenderung dianggap, oleh satu pihak, sebagai beralih dari ajaran yang sesat ke ajaran yang benar, dan oleh pihak lain, sebagai beralih dari ajaran yang benar ke ajaran yang sesat.

Kebenaran agama pun mulai mengalami revolusi kopernikan. Bukan kebenaran agama yang menentukan sikap dan perilaku, melainkan sikap dan perilaku yang dikukuhkan menjadi kebenaran agama. Inilah yang terjadi ketika yang sosiologis telah menjadi teologis.¹⁷ Kebenaran-kebenaran agama pun sering direduksi menjadi kebenaran matematis dan kebenaran faktual, yang terkungkung dalam dikotomi salah dan benar. Kebenaran agama seolah-olah bisa diperiksa melalui metode-metode empiris untuk memastikan bahwa yang satu benar dan yang lainnya salah. Pada hal kegiatan beragama merupakan perwujudan dari ajaran agama. Artinya praktik kehidupan beragama tidak bisa mengatur kebenaran agama. Tindakan mengubah potret wajah seseorang, misalnya, tidak akan serta merta mengubah wajah aslinya. Tindakan menyobek foto, karena tidak senang dengan wajah Anda yang ditampilkan di situ, adalah keputusan, bukan kesimpulan. Potret itu hanya menampilkan gambar secara apa adanya, bukan untuk menyulut rasa tidak senang atau benci. Kebencian adalah keputusan, seperti halnya orang juga bisa memutuskan untuk tertawa atau minder atau merasa inferior.¹⁸

Keputusan-keputusan untuk berkonflik juga sering menyangkut aspek wujud peribadatan, ritual dan tata liturgi, simbol-simbol, bahasa, bahkan kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat. Pada hal ritual dan simbol-simbol ini merupakan sisi-tampak dari ajaran dogmatis, yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dan dimengerti secara tepat oleh orang luar. Pantas kalau tata cara ibadat dan ritual satu agama bisa saja dianggap sangat aneh oleh orang dari

agama lain, karena sarat dengan simbol dan analogi yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh orang seiman. Bahkan bahasa-bahasa pada masing-masing agama pun mempunyai makna sendiri. Atau --dengan inspirasi dari tulisan-tulisan Wittgenstein-- dapat dikatakan bahwa setiap agama adalah bentuk hidup (*form of life*) dengan permainan bahasanya (*language game*) sendiri. Orang Kristen dan, katakanlah, orang Budha, yang termasuk dalam komunitas dan tradisi religius yang berbeda, menggunakan bahasa religius yang berbeda, dengan arti masing-masingnya, sesuai dengan konteks bentuk hidup religius yang berbeda.¹⁹ Sekali lagi, semua ini pun lebih merupakan perbedaan daripada konflik. Kalau akhirnya menimbulkan konflik, berarti sudah melalui tahap keputusan dan bukan sekadar konklusi.

Keputusan-keputusan konflik ini sering juga dihantui kepentingan para pendompleng (*free-riders*) di belakangnya. Para pendompleng ini telah memanfaatkan perbedaan-perbedaan untuk menimbulkan perseteruan. Perseteruan-perseteruan ini pun sering ditiupkan secara efektif oleh para provokator, yang mengidentikkan atau mendomplengkan kepentingannya dengan, atau pada, kepentingan agama.

Dalam hal ini agama hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang bukan agama. Dan karena alasan sekularisasi, bahwa ajaran agama juga harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, maka mudah sekali orang melakukan segala sesuatu atas nama agama. Dan kalau kebenaran agama dianggap mutlak maka banyak orang beragama yang kurang kritis akan mudah termanfaatkan. Ada anggapan bahwa apa yang dilakukan atas nama agama itu selalu baik dan benar. Karena itu, meminta sumbangan atas nama agama selalu saja dianggap benar, walaupun kadang-kadang tidak disertai dengan pertanggung-jawaban

yang jelas. Kegiatan yang kurang terjamin akuntabilitasnya ini, bisa tetap saja mendapat kepercayaan, karena orang berkeyakinan bahwa akal bulus yang memanfaatkan agama akan mendapat ganjaran langsung oleh Tuhan sendiri.

Karena kegiatan beragama termasuk wilayah privat dan sulit dikontrol secara publik, agama mudah digunakan sebagai kedok untuk merebut simpati dan melakukan mobilisasi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Agama dijadikan pembenar untuk tindakan-tindakan tertentu, bahkan untuk tindakan-tindakan sendiri, sambil mempersalahkan tindakan-tindakan lain yang bertolak belakang dengan kepentingan tertentu tadi. Orang beragama lalu kehilangan sikap kritis, dan selanjutnya dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan politik, sosial dan ekonomi. Agama beralih fungsi menjadi instrumen yang ampuh untuk berbagai kepentingan. Dr. Asghar Ali Engineer dari India pernah, dalam satu kunjungannya ke Indonesia, mengatakan bahwa ketegangan antar pemeluk agama di negaranya, lebih banyak terjadi di kalangan para pemimpin karena kepentingan sosial-ekonomi-politik ketimbang terjadi di kalangan rakyat jelata dan sebab-sebab doktrin masing-masing agama. Sekali lagi alasan sekularisasi bahwa agama harus menyerap sampai ke bidang-bidang kehidupan sekuler bisa berakibat terbalik bahwa bidang-bidang kehidupan sekuler justru yang mengendalikan agama. Dalam konteks Filipina, Kardinal Sin pernah mengingatkan bahwa upacara-upacara keagamaan yang menyertai kegiatan politik tidak menunjukkan bahwa politik telah dipengaruhi oleh agama, melainkan sebaliknya bahwa agama telah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh politik.

Agama juga gampang terseret ke dalam alam ideologis karena yang penting dalam ideologi itu bukan argumentasi yang logis rasional melainkan

relevansi dan daya tarik. Marxisme misalnya, adalah satu ideologi yang sebenarnya sudah mendapat banyak kritik sebagai satu ideologi yang pincang, tetapi tetap saja menarik bagi banyak orang bernasib buruk yang merasa dibela oleh ideologi ini. Maka walaupun banyak dikritik, ideologi ini tetap relevan bagi mereka yang tertindas. Agama pun mudah sekali dijadikan konsep ideologis yang menghanyutkan, terutama kalau agama dianggap memiliki kebenaran absolut, dan tak pernah sesat. Selanjutnya, bila segala sesuatu yang menyangkut agama dianggap benar, ideologi yang membawa bendera agama pun akan mendapat sambutan serupa.

4. KEMATANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN

Sudah dikatakan bahwa agama tetap akan terus beraneka ragam, dan bahwa fakta ini tidak dapat memvalidasikan kesimpulan untuk berkonflik. Konflik dan kekerasan antar agama sesungguhnya bukan merupakan kesimpulan melainkan merupakan keputusan. Maka setiap keputusan yang diambil atas dasar perbedaan harus dipertimbangkan secara matang. Perbedaan itu adalah bagian dari kebebasan yang merupakan hakikat kodrati yang ada pada manusia. Hakikat kodrati ini tidak bisa diabaikan, melainkan harus diperhitungkan dan disikapi secara tepat dalam hidup. Sama halnya, hakikat alamiah dalam hukum gravitasi, misalnya, merupakan fakta yang tidak dapat ditolak. Mereka yang tidak memperhitungkan hakikat alamiah ini dalam hidup, akan banyak mengorbankan biaya dan tenaga secara sia-sia.

Keputusan selalu diambil dalam kebebasan, dan karena itu harus dipertanggung jawabkan. Dasarnya selalu adalah bahwa martabat manusia senantiasa mendapat tempat utama dalam setiap keputusan. Konflik destruktif

dan kekerasan pasti bukan keputusan yang mengutamakan martabat manusia, dan jauh dari menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban.

Kalau David Hume menegaskan bahwa kita tidak bisa menyimpulkan sebuah kalimat perintah dari sebuah premis yang deskriptif, berarti kalimat perintah yang ditarik dari sebuah premis deskriptif sesungguhnya bukan kesimpulan, melainkan keputusan. Dari sebuah premis yang deskriptif bisa diambil keputusan yang imperatif. Di sini letak kebebasan sebuah keputusan. Kesimpulan selalu bersifat niscaya dan serta merta, sedangkan keputusan, tidak. Dalam keputusan selalu ada jarak dan keluangan. Kalau kesimpulan selalu melihat sesuatu berkaitan dengan aspek relativisme, maka keputusan selalu melihat sesuatu berkaitan dengan aspek subyektivisme. Atas setiap perbedaan, keputusan-keputusan yang diambil, yang berkaitan dengan perbedaan itu, lebih mendapatkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dan menghargai manusia sebagai subyek yang bermartabat. Karena itu keputusan lebih mengandaikan kematangan subyek dalam mengambil keputusan ketimbang ketaatan-asas-an subyek dalam membuat kesimpulan.

Banyak masalah terjadi dalam hubungan antar agama karena orang serta merta menarik kesimpulan dari perbedaan-perbedaan, dan bukannya mengambil keputusan akal sehat, berdasarkan niat baik untuk menciptakan keharmonisan dalam perbedaan-perbedaan itu. Karenanya keputusan-keputusan yang diambil seharusnya tidak atas dasar pertimbangan kelompok parsial, melainkan mengacu pada kemanusiaan secara universal.

Yang menjadi pusat perhatian agama sesungguhnya adalah manusia. Manusia menata hubungannya dengan Tuhan dan dengan alam sekalipun, demi kepentingan manusia. Tetapi ironisnya adalah bahwa situasinya menjadi terbalik

pada zaman kebangkitan agama ini. Agama malah lebih dipusatkan pada kepentingan Tuhan, yang sepertinya juga menjadi kamufase kepentingan agama itu sendiri. Manusia harus tunduk pada agama dan kalau perlu dikorbankan demi agama yang nota bene berkemungkinan juga terkontaminasi atau didomplengi oleh kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan-kepentingan itu secara serta merta dibenarkan karena berlabel agama, dan karenanya tidak akan pernah salah.

Martabat manusia malahan direduksi dan dikungkung dalam formalisme yang kaku, dan dalam dikotomi orang saleh dan orang berdosa, beragama dan kafir, surga dan neraka, bahkan dalam perjumpaan-perjumpaan yang saling meniadakan (*exclusification*). Manusia yang tadinya subyek beragama, beralih menjadi obyek. Dalam hal ini, kepentingan umat manusia dikorbankan demi kepentingan agama tunggal tertentu, dan hampir selalu diklaim sebagai identik dengan kepentingan Tuhan. Ada semacam pelembagaan nilai keselamatan dalam keberagamaan, seolah-olah tanpa menganut agama tertentu tidak akan ada keselamatan.²⁰

Karena itu humanisme bisa dijadikan titik konvergensi keberanekaragaman agama. Bahwa dalam agama apa pun, manusia harus tetap menjadi fokus kepentingan. Bagaimana pun juga martabat manusia universal tidak bisa disisihkan dari perhatian pengembangan agama. Agama bukan untuk menebar kekuasaan dan mengukuhkan kedudukan; juga bukan untuk meningkatkan pengetahuan, melainkan untuk membuat kita bertindak, membantu kita hidup.²¹

Sikap yang dibangun berhadapan dengan pluralitas budaya tentu saja merupakan sikap yang perlu juga dibangun untuk pluralitas agama. Agama apa pun yang dianut manusia, senantiasa berikhtiar untuk menyelamatkan

manusia, bukan mencelakakan. Maka akal sehat akan menertawakan manusia ketika agama justru merusak manusia. Pertanyaan kritis yang sering dilancarkan adalah untuk apa beragama?

Agama sebagai persekutuan iman seharusnya mengikat diri pada tugas profetis dan penyelamatan. Membangun permusuhan dan menebar kebencian jelas merupakan sikap yang bukan hanya tak elok bagi agama, melainkan juga mengkhianati hakikat agama sendiri. Hal penting dalam agama adalah mengubah mental manusia dan bukan sekadar melabelkan kuantitas penganut; membentuk kualitas yang berkarakter, dan bukannya sekadar menghimpun kuantitas yang mengambang.

Banyak persoalan timbul ketika agama sudah menjadi mirip dengan organisasi-organisasi sekuler dan ideologis lainnya; agama cenderung lebih menyerupai kelompok eksklusif daripada menjadi persekutuan yang inklusif. Agama tidak lagi dibangun sebagai persekutuan yang menyapa dan mengundang, melainkan sebagai kelompok yang memperkokoh diri dengan cara yang demagogis, sambil memproklamirkan musuh bersama di luar, demi melakukan konsolidasi ke dalam.

Dengan kata lain, berhadapan dengan pluralitas agama, setiap komunitas agama perlu juga mengintrospeksi diri dan menguji sikap dan perilakunya berdasarkan landasan-landasan etis. Landasan etis ini tidak dimaksudkan untuk menguji apakah ajaran agama itu benar melainkan apakah penafsiran *manusia* terhadap ajaran agama itu tepat. Agama tak pernah salah mengajar, tetapi manusia bisa salah menangkap dan menafsirkannya. Maka yang perlu diamati secara kritis itu bukan ajaran agama, melainkan tangkapan pemahaman dan tafsiran manusia melalui akal budinya yang terbatas.

PLURALITAS AGAMA DAN KONFLIK BERAGAMA
BENYAMIN MOLAN

Etika secara tradisional berfungsi untuk melayani baik perbedaan (respek terhadap yang lain, pluralisme) maupun kesamaan (kesetaraan, kemanusiaan).²²Maka, prinsip-prinsip etis bagi terbangunnya hidup bersama yang harmonis, perlu ditanamkan dalam berbagai bidang kegiatan dan tindakan manusia. Dalam kegiatan politik, ekonomi dan bisnis, teknologi, seksualitas, dan tentu saja agama perlu ada payung etis. Di dunia politik sudah lama disadari bahwa politik yang bermartabat adalah politik yang beretika. Begitu juga di dunia bisnis, tidak ada keraguan bagi para pelaku bisnis bahwa bisnis yang bisa berkembang adalah bisnis yang beretika. Dunia teknologi juga mengenal etika rekayasa. Juga ada etika seksual untuk menata penyaluran dorongan seksualitas manusia secara bermartabat. Maka dalam kegiatan beragama pun perlu ada etika beragama untuk mengatur perilaku manusia dalam beragama. Ajaran-ajaran moral dalam agama yang merupakan penafsiran dari manusia perlu diuji secara etis.²³

Satu fakta primer yang tidak dapat disangkal adalah bahwa semua penganut agama manapun dan ajaran apapun adalah manusia. Rasa kemanusiaan sudah tertanam dalam suara hati setiap manusia, sehingga ketika ada sesama yang menderita, orang tergerak untuk menolong. Ketika ada sesama yang kelaparan, orang pun berbagi. Ketika ada sesama yang terkena musibah bencana alam, entah di negara mana, dari suku apa, dari agama mana, semua manusia lain mengirimkan bantuan. Miris rasanya kalau solidaritas yang kuat antar sesama manusia itu kemudian direduksi bahkan dirusak karena ada perbedaan dalam agama dan keyakinan.

Solidaritas ini bahkan sudah dibangun dalam berbagai kelompok sosial, entah keluarga, masyarakat, rukun tangga, bangsa atau negara. Ironis

kalau agama yang seharusnya menjadi pelopor dalam solidaritas ini, malah tampil sebagai penghambat bagi terbangunnya solidaritas kemanusiaan. Solidaritas kemanusiaan harus menjadi agenda bersama baik dari masyarakat agama maupun masyarakat bangsa. Jika tidak maka agama akan merongrong upaya untuk membangun solidaritas kemanusiaan baik yang bersifat nasional (regional) maupun internasional (universal).

5. PENUTUP

Ryuho Okawa, dalam kata Pengantar bukunya *The Challenge of Religion*, mengatakan: “*The true enemy of religion should not be the mass media or politics. The enemy of religion ought to be religion. What I mean is that true criticism of religion ought to spring from within the domain religion.*”²⁴

Musuh sesungguhnya dari agama, bukan media massa atau politik melainkan agama itu sendiri. Kritik sejati dari agama harus bersemi dari dalam agama itu sendiri. Bisikan kritis sehalus apa pun yang datang dari luar akan mudah dimeteraikan sebagai lawan, dan karenanya tidak perlu didengarkan. Bisikan halus tersebut bahkan bisa saja menyulut konflik yang besar, bukan karena kritik itu salah melainkan terutama karena datang dari luar. Maka kritik yang lebih efektif seharusnya datang dari internal agama itu sendiri.

Setiap agama punya *language game* sendiri. Dan yang paling memahami seluk beluk agama adalah penganutnya sendiri. Dengan demikian kritik-kritik dari luar, bisa dianggap sebagai keliru karena berasal dari pihak yang kurang paham atau salah memahami. Implikasinya adalah ketika kritik-kritik dari luar dibungkam oleh *language game*, maka diperlukan keberanian berbagai agama untuk melihat ke dalam diri sendiri (introspeksi), menengok ke belakang (retrospeksi), mengevaluasi dan mengoreksi diri sendiri.

Apalagi kalau pengambilan keputusan yang dilakukan setiap agama dalam menghadapi perbedaan dan keanekaragaman itu, mengandaikan bahwa keputusan tersebut harus mendapat kata akhirnya dari agama. Keputusan tidak bisa diwakili atau diserahkan pada pihak lain. Dan instrumen dan metode yang bisa bermanfaat untuk mengkritisi, mengevaluasi, dan mengoreksi diri sendiri adalah prinsip, kaidah, dan metode etika. Etika sebagai refleksi kritis atas tindak laku manusia dan ajaran moral dari berbagai pihak, bisa dimanfaatkan untuk menguji keputusan-keputusan yang diambil secara bertanggung jawab, adil, beradab, menghargai kebebasan dan martabat manusia, serta sesuai dengan suara hati. Keputusan itu harus baik dan benar, adil dan beradab, serta hormat terhadap diri sendiri.²⁵

Landasan etis ini memadai untuk menjadi pedoman dalam menata dan membangun masyarakat majemuk, (termasuk di sini kemajemukan agama), untuk menjadi masyarakat multikulturalistik yang menghargai perbedaan; dan perbedaan-perbedaan itu tidak untuk dilihat sebagai kondisi ideal dalam berkompetisi melainkan untuk dimanfaatkan sebagai kondisi faktual dalam berkomposisi, bekerja sama membangun struktur kehidupan beragama yang lebih beradab dan “berkebudayaan”.²⁶ Dan salah satu tanda dan ciri manusia yang berbudaya adalah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri, dan berubah. Ini perlu dilakukan secara sadar karena agama-agama cenderung sangat setia pada tradisi dan tidak gampang berubah. “Agama membenci perubahan. Ada kecenderungan dalam agama untuk tetap menancap pada hal-hal yang tua. Makin tua makin baik, atau makin tua makin bernilai. Tetapi dalam zaman modern, agama harus mengadopsi ucapan, pemikiran, dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan yang berubah. Itu berarti inovasi dalam agama itu sangat

penting,”²⁷ tidak untuk mengubah ajaran agama melainkan untuk membawa ajaran agama melintasi budaya manusia agar tetap menjadi pegangan dan pedoman hidup, dan bukannya menjadi arena konflik dan perseteruan yang serta merta.

CATATAN AKHIR

¹ Bisa ditemukan dalam Alois A. Nugroho, “Pancasila: Dasar untuk Menciptakan Persatuan Nasional Dengan Tetap Menghormati Kesenjangan dalam Kemajemukan Sosial,” *Respons: Jurnal Etika Sosial* volume 18 no. 01 (2013): 11-15.

² Bisa dibaca juga dalam Molan, Benyamin, “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik,” dalam *Respons: Jurnal Etika Sosial* volume 16 no. 2 (2011): 263-270.

³ Thomas Lickona adalah penulis buku “What Is Effective Character Education”, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan membangun karakter.

⁴ Jurgen Habermas: “Basis Prapolitis sebuah Negara Hukum yang Demokratis?”, dalam Paul Budi Kleden & Adrianus Sunarko, (ed.) (2010), *Dialektika Sekularisasi*, Yogyakarta, Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, hal. 4, 24.

⁵ Sunarko, A., “Dialog Teologis dengan Jurgen Habermas” dalam: Paul Budi Kleden & Adrianus Sunarko (ed.). *op cit.*, hal. 60.

⁶ Bisa disimak dalam pembicaraan Immanuel Kant tentang postulat-postulat yang sudah ada dalam diri manusia yang harus diterima sebagai ada.

⁷ Molan, Benyamin. 2015. *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta, Indeks, hal. 35-51.

⁸ Sunarko, A., *op.cit.*, hal. 60.

⁹ Dua, Mikhael, (2014), *Metode dan Perubahan Pandangan*, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hal. 96-103.

¹⁰ C. Stephen Evans,(1985),*Philosophy of Religion*, Illinois USA, Inter Varsity Press, hal. 167.

¹¹ John H. Hick,(1979),*Philosophy of Religion* (2nd ed.), New Delhi, Prentice Hall, hal. 119.

PLURALITAS AGAMA DAN KONFLIK BERAGAMA
BENYAMIN MOLAN

¹² David Hume, "An Enquiry Concerning Human Understanding", para 95, dikutip dalam John H. Hick, *op. cit.* hal. 119.

¹³ Ungkapan David Hume ini dikutip dalam Gaarder Jostein, (1991), *Sophie's World*, edisi Indonesia, 1994, *Dunia Sophie*, Bandung, Mizan hal. 362.

¹⁴ Jelas, keputusan ini lebih bersifat manipulatif, karena memanfaatkan perbedaan untuk menyulut konflik dan meraih keuntungan sesuai dengan *vested interest*.

¹⁵ Wilson, Bryan, (1983), *Religion in Sociological Perspective*, New York, Oxford University Press, hal. 27.

¹⁶ Bruce B. Lawrence, "Dari Fundamentalisme ke Fundamentalisme-fundamentalisme: Suatu Ideologi Religius dalam Multi-bentuk," dalam Paul Helas, *Agama sudah Mati* (terj. Benyamin Molan) hal. 99.

¹⁷ Dalam satu kesempatan wawancaranya, Dr. Asghar Ali juga mengemukakan pendapatnya yang bernada serupa tetapi menyangkut jender, bahwa perempuan telah direndahkan martabatnya dalam agama, ketika yang sosiologis menjadi teologis. Bahwa kewajiban perempuan itu lebih besar dari haknya merupakan gejala sosiologis di mana kaum pria menjadi lebih berkuasa. Ini adalah kerangka sosiologis yang tiba-tiba menjadi dasar tumbuhnya pandangan teologis, yang menempatkan kedudukan kaum wanita di bawah kaum pria. Dr. Asghar Ali Engineer: Perempuan Direndahkan Ketika Yang Sosiologis Menjadi Teologis, *Kompas*, 8 Agustus 1994.

¹⁸ "No one can make you feel inferior without your permission" dalam Eric Jensen. 2009. *Super Teaching*, Thousand Oaks, Corwin Press, hal 126 .

¹⁹ John H. Hick. 1979. *Philosophy of Religion* (2nd ed.), New Delhi, Prentice Hall, hal. 121.

²⁰ Ivan Illich, penulis buku *Deschooling Society* mengkritik praktik pelemagaan nilai. Nilai kecerdasan sering dilembagakan dalam sekolah, nilai keamanan direduksi ke dalam militer, nilai kesematan sering direduksi ke dalam agama.

²¹ Emile Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life* mengatakan: In fact, they feel that the real function of religion is not to make us think, to enrich our knowledge, nor to add to the conceptions which we owe to science others of another origin and another character, but rather, it is to make us act, to aid us to

live (Hal. 416). Sesungguhnya mereka merasa bahwa fungsi sejati dari agama itu bukan membuat kita berpikir, memperkaya pengetahuan kita, ... melainkan untuk membuat kita bertindak, membantu kita hidup.

²² Paul Heelas (ed.). 1998. *Religion: Modernity and Postmodernity*, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc. edisi Indonesia, terjemahan Benyamin Molan, hal. 8.

²³ Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bung Karno (dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 saat dia menyampaikan konsep Pancasila sebagai dasar Negara) sebagai KeTuhanan yang Berkebudayaan. Masing-masing agama boleh menyembah Tuhannya tetapi dengan cara yang beradab.

²⁴ Ryuho Okawa, (1993), *The Challenge of Religion. Tokyo*, IRH Press Co. Ltd, hal. 2-3.

²⁵ Magnis-Suseno, Franz, (1987). *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 129-140.

²⁶ Rumusan Sila 5 Pancasila oleh Bung Karno pada Pidato 1 Juni 1945, “KeTuhanan yang Berkebudayaan.” Maksudnya adalah bahwa setiap agama boleh menyembah Tuhannya masing-masing, tetapi dengan cara yang beradab. Gontok-gontokan antara kelompok agama pasti bukanlah cara yang beradab.

²⁷ Ryuho Okawa. *Op. cit.* hal. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2004. *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Blackburn, Simon. 2001. *Being Good*, New York, Oxford University Press.

Buber, Martin. 1952. *Eclipse of God*, New York, Harper & Brothers Publishers.

Davies, Brian. 1993. *An Introduction to the Philosophy of Religion*, New York, Oxford University Press.

Durkheim, Emile. 1915. *The Elementary Forms of Religious Life*, London, George Allen and Unwin Ltd.

Evans, C. Stephen. 1985. *Philosophy of Religion: Thinking about Faith*, Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press.

PLURALITAS AGAMA DAN KONFLIK BERAGAMA
BENYAMIN MOLAN

- Feezel, Randolph M. & Hancock, Curtis L. 1991. *How Should I Live? Philosophical Conversations About Moral Life*, New York, Paragon House.
- Hatch, Gary Laine. 1999. *Arguing in Communities* (2/E), Maintain View, Mayfield Publishing Company.
- Heelas, Paul. 1998. *Religion: Modernity and Postmodernity*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc. 2003. *Agama Sudah Mati?*, terjemahan Edisi Indonesia oleh Benyamin Molan Jakarta, Mediator.
- Hick John H. 1979. *Philosophy of Religion*, New Jersey, Prentice Hall.
- Kleden, Ignas. 2001. *Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Leahy, Louis. 1985. *Aliran-aliran Besar Ateisme*, Yogyakarta, Kanisius.
- Molan Benyamin. 2015. *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta, Indeks.
- Okawa, Ryuho. 1993. *The Challenge of Religion: The Wind of Miracle from Japan*. Tokyo, IRH Press Co. Ltd.
- Suseno, Magnis. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta, Kanisius.
- Wilson, Bryan. 1983. *Religion in Sociological Perspective*. New York, Oxford University Press.